

PERKEMBANGAN INDUSTRI KECIL
DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA
DI KOTABADYA UJUNG PANDANG



UNIVERSITAS HASANUDDIN
D-00-96
Hasnawati
1415
Hasnawati
969-08-1415

OLEH

HASMAWATI

Nomor Mahasiswa : 87 01 052

FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN STUDI PEMBANGUNAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG
1996

**PERKEMBANGAN INDUSTRI KECIL
DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA
DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG**

D L E H

HASMAWATI

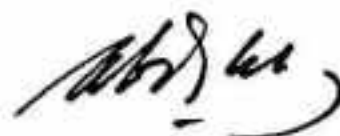
NOMOR MAHASISWA : 87 01 052

**SKRIPSI SARJANA LENGKAP UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN
SYARAT GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN STUDI PEMBANGUNAN PADA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG**

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



(PROF. DR. H. RAHARDJO ADISASMITA, M. Ec.) (DRS. A. KAHAR AKIL, M. S.)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, maka selesailah penyusunan skripsi ini walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Tulisan ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.

Namun demikian penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan senang hati penulis akan menerima segala saran dan kritikan yang berupa petunjuk demi tercapainya kesempurnaan dan kemajuan ilmu yang telah ada dalam wawasan dan pemikiran penulis.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

- 1). Bapak Prof. Dr. H. Rahardjo Adisasmita, M.Ec. dan Drs. A. Kahar Akil, M.S. Sebagai dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberikan petunjuk kepada penulis.
- 2). Para dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan semenjak berada di Fakultas Ekonomi.
- 3). Kepada Bapak Pimpinan dan seluruh karyawan pada Kantor Departemen Perindustrian dan Kantor Departemen Tenaga

Kerja Kotamadya Ujung Pandang serta Biro Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan, atas kesediaannya memberika informasi dan data yang bermanfaat bagi penulisan ini.

- 4). Rekan-rekan mahasiswa yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi selama proses pendidikan, dan semua pihak yang tak tersebut satu persatu.
- 5). Terakhir kepada Ayahanda Alm. H. M. Yahya Dg Malewa dan Ibunda H. Maryam Dg Tanaga yang tercinta, suami tersayang Drs. Ridwan Mustakim, dan seluruh kakak dan adik serta segenap keluarga yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil selama menuntut ilmu dan melanjutkan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin hingga selesai. Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan disisi Allah SWT. Amin.

Ujung Pandang Juli 1996

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	5
1.4. Hipotesis	6
1.5. Sistematika Pembahasan	6
BAB II. METODOLOGI	8
2.1. Kerangka Konseptual	8
2.2. Daerah Penelitian	12
2.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	12
2.4. Jenis dan Sumber Data	13
2.5. Metode Analisis	13
BAB III. KERANGKA TEORI	15
3.1. Pengertian Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja	15
3.2. Pengertian Industri dan Industri Kecil	19
3.3. Penggolongan Industri Menurut Bidang	

	Usahanya	25
	3.4. Manfaat Pembangunan Industri Kecil ...	27
BAB	IV. PEMBAHASAN	33
	4.1. Perkembangan Penduduk	33
	4.2. Perkembangan Tenaga Kerja	39
	4.3. Masalah Kesempatan Kerja	45
	4.4. Keadaan Perkembangan Industri Kecil ..	48
	4.4.1. Jumlah Unit Usaha	49
	4.4.2. Jumlah Tenaga Kerja	51
	4.4.3. Nilai Investasi	52
	4.4.4. Nilai Produksi	54
	4.4.5. Nilai Bahan Baku	55
	4.5. Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja pada Subsektor Industri Kecil di Kotamadya Ujung Pandang	56
	4.6. Kebijakan Pembinaan dan Pengem- bangan Industri Kecil	60
	4.6.1. Usaha-Usaha yang telah ditempuh oleh Pemerintah dalam Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil di Kotamadya Ujung Pandang	65
BAB	V. PENUTUP	70
	5.1. Kesimpulan	70
	5.2. Saran-Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
I. PENGGOLONGAN INDUSTRI MENURUT KODE INTERNASIONAL STANDARD OF INDUSTRIAL CLASIFICATION (ISIC), DENGAN DUA DIGIT	27
II. PERKEMBANGAN PENDUDUK DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG TAHUN 1988 - 1992	37
III. JUMLAH DAN KEPADATAN PENDUDUK PER KECAMATAN DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG TAHUN 1992	38
IV. PENDUDUK KOTAMADYA UJUNG PANDANG MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 1988 - 1992	41
V. JUMLAH TENAGA KERJA DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG PADA TAHUN 1988 - 1992	41
VI. PERKEMBANGAN ANGKATAN KERJA DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG TAHUN 1988 - 1992	44
VII. PERKEMBANGAN UNIT USAHA PADA INDUSTRI KECIL DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG TAHUN 1988 - 1992	50
VIII. PERKEMBANGAN TENAGA KERJA PADA INDUSTRI KECIL DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG TAHUN 1988 - 1992 .	51
IX. PERKEMBANGAN JUMLAH INVESTASI PADA INDUSTRI KECIL DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG TAHUN 1988 - 1992	53
X. PERKEMBANGAN NILAI PRODUKSI PADA INDUSTRI KECIL DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG TAHUN 1988 -1992 ..	54
XI. PERKEMBANGAN NILAI BAHAN BAKU PADA INDUSTRI KECIL DIKOTAMADYA UJUNG PANDANG TAHUN 1988 - 1992	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan diberbagai negara mengalami banyak perkembangan dari tahun ke tahun, baik pembangunan di sektor pertanian, sektor perdagangan, perhubungan, pertambangan dan energi maupun disektor industri, yang kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan tarap hidup dan kesejahteraan masyarakatnya.

Demikian pula halnya dengan negara Indonesia yang masuk dalam kategori negara sedang berkembang, usaha ini pun menjadi pusat perhatian sebagaimana tercermin dalam sasaran pembangunan jangka panjang di bidang ekonomi yaitu terciptanya struktur ekonomi yang seimbang, dimana terdapat kemampuan dan kekuatan industri yang maju yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh.

pembangunan industri adalah bagian dari usaha jangka panjang untuk merombak struktur ekonomi yang tidak seimbang karena terlalu bercorak pertanian kearah struktur ekonomi yang lebih kokoh dan seimbang antara sektor pertanian dan industri. Pembangunan industri ditujukan untuk memperluas kesempatan kerja, pemeratakan kesempatan berusaha, meningkatkan ekspor, menghemat devisa, menunjang pembangunan daerah dan memanfaatkan sumber daya alam dan energi serta sumber daya manusia. Walaupun demikian usaha tersebut harus tetap bertumpu pada asas strategi pembangu-

nan yang telah dijalankan selama ini yaitu trilogi pembangunan yang mencakup pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas. Hal ini perlu diperhatikan karena transformasi ekonomi menuju kestruktur ekonomi yang mempunyai efisiensi yang lebih tinggi, penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak, output yang lebih beragam dan berkualitas, pemerataan yang lebih mendasar dan stabilitas yang mantap dan dinamis, tidak cukup dilaksanakan hanya dengan pembangunan sektor industri semata.

Akan tetapi dalam pelaksanaan strategi pembangunan tersebut negara kita diperhadapkan pada suatu masalah yang cukup urgen yakni masalah kependudukan. Dalam hal ini adalah pertambahan penduduk yang cukup pesat, jumlah penduduk yang besar disatu pihak menggambarkan potensi yang dapat dikerahkan untuk usaha produktif yaitu menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi dilain pihak jumlah penduduk yang besar menunjukkan besarnya tantangan yang harus dihadapi yang merupakan faktor penghambat dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Dengan adanya pertambahan penduduk yang pesat itu, menyebabkan bertambahnya tenaga kerja dan angkatan kerja, sedangkan di pihak lain kurangnya lapangan kerja yang dapat menampung pertambahan tenaga kerja tersebut. Konsekuensi dari dua keadaan yang bertentangan ini, menimbulkan masalah seperti bertambahnya pengangguran. Disamping itu tenaga kerja yang ada tingkat produktivitasnya masih rendah, sehingga usaha untuk mencapai tingkat kesejahter-

raan secara merata masih sukar untuk diwujudkan.

Melihat kenyataan yang kurang menguntungkan tersebut maka pemerintah telah berusaha untuk memperbaikinya yaitu dengan jalan menggalakkan program pembangunan disegala bidang, khususnya dibidang ekonomi. Dalam hal ini adalah berusaha memperluas kesempatan kerja diseluruh pelosok tanah air melalui pengembangan usaha yang dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja.

Untuk menampung tenaga kerja yang semakin hari semakin meningkat, sektor industri terutama subsektor industri kecil merupakan industri padat karya sehingga masalah peledakan tenaga kerja pada sektor kegiatan ekonomi tertentu dapat diatasi.

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (1988) dikemukakan bahwa:

"Pembangunan industri kecil termasuk industri kerajinan dan industri rumah tangga serta yang informal dan tradisional dilanjutkan dan diarahakan untuk memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan ekspor, menumbuhkan kemampuan dan kemandirian berusaha serta meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan pengrajin." 1)

Dengan memperhatikan kutipan di atas, ini berarti bahwa sektor industri harus semakin dipacu, tidak hanya industri besar dan industri menengah, tetapi juga termasuk industri kecil, ini tidak lain bertujuan untuk meningkat-

1) Ketetapan MPR NO.II/MPR/1988, Tentang GBHN (Bahan Penataran dan Bahan Referensi Penataran, Terbitan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, 1988), Hal. 131.

kan tarap hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan industri besar dan menengah harus dapat merangsang pembangunan industri kecil tersebut.

Demikian halnya pembangunan industri di Sulawesi Selatan, khususnya di Kotamadya Ujung Pandang dimana pembangunan subsektor industri kecil merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan rencana pembangunan industri secara nasional, dimana industri kecil perlu untuk dikembangkan agar dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak dalam usaha memperbesar sumbangannya terhadap pembangunan ekonomi nasional pada umumnya.

Dalam pada itu, berbagai permasalahan pembangunan nasional kita dewasa ini diantaranya permasalahan perluasan lapangan kerja, merupakan masalah yang berkaitan erat dengan permasalahan pembangunan lainnya, khususnya dalam permasalahan pertambahan penduduk, angkatan kerja dan tenaga kerja itu sendiri. Dan tampaknya subsektor industri kecil merupakan suatu alternatif kebijakan yang cukup efektif dalam menanggulangi hal tersebut, atau paling tidak sebagai upaya untuk penyaluran sejumlah angkatan kerja yang berada di Kotamadya Ujung Pandang pada khususnya dan Sulawesi Selatan pada umumnya.

Sejalan dengan pola pemikiran tersebut maka penulis ingin mencoba menganalisis lebih lanjut perkembangan industri kecil dan kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja di Kotamadya Ujung Pandang periode 1988 - 1992.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka masalah yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

- a. Pertambahan penduduk menyebabkan jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja semakin meningkat, maka sejauhmana peranan subsektor industri kecil dalam menyerap sejumlah angkatan kerja di Kotamadya Ujung Pandang.
- b. Dan Sejalan pula perkembangan industri kecil di Kotamadya Ujung Pandang.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan dan kegunaan penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui berapa besar tenaga kerja yang dapat diserap oleh subsektor industri kecil dari jumlah angkatan kerja di Kotamaya Ujung Pandang.
- b. Untuk mengetahui keadaan perkembangan subsektor industri kecil, perkembangan penduduk, tenaga kerja dan angkatan kerja setiap tahunnya.
- c. Kegunaan dari penulisan ini adalah sebagai gambaran kepada pemerintah daerah maupun kepada pihak lain yang berkecimpung dalam upaya pengembangan industri di daerah ini.

1.4 Hipotesis

- a. Diduga bahwa walaupun terdapat peningkatan dalam jumlah tenaga kerja dibidang industri kecil di Kotamadya Ujung Pandang, akan tetapi daya serapnya terhadap sejumlah angkatan kerja masih kecil.
- b. Diduga bahwa perkembangan industri kecil dari tahun ke tahun semakin meningkat dan berkembang.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan selanjutnya, maka penulis membagi ke dalam komposisi bab sebagai berikut :

- Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, hipotesis dan sistematika pembahasan.
- Bab II : Metodologi berisikan kerangka konseptual, daerah penelitian, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, jenis dan sumber data, dan metode analisis.
- Bab III : Adalah bab yang membahas beberapa konsep teori mengenai pengertian tenaga kerja dan angkatan kerja, pengertian industri dan industri kecil, penggolongan industri menurut bidang usahanya, serta manfaat pembangunan industri kecil.
- Bab IV : Adalah merupakan bab inti yang membahas mengenai perkembangan penduduk, perkembangan tenaga kerja dan masalah kesempatan kerja, keadaan

perkembangan industri kecil , serta membahas mengenai tingkat penyerapan tenaga kerja dan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industri kecil di Kotamadya Ujung Pandang.

Bab V : Merupakan penutup, adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

METODOLOGI

2.1 Kerangka Konseptual

Sejak awal dasawarsa tahun tujuh puluhan secara tajam mulai disadari, bahwa meskipun mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun kebanyakan negara berkembang belumlah berhasil menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi angkatan kerja pada umumnya; baik ditinjau dari segi tingkat pendapatan, ataupun dari kesesuaian pekerjaan terhadap keahlian. Harapan bahwa pertumbuhan yang pesat dari sektor industri modern akan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran secara tuntas, ternyata masih berada pada rentang perjalanan yang panjang. Bertolak dari kenyataan inilah, maka eksistensi industri kecil telah mengambil tempat penting dalam masalah kesempatan kerja dan ketenagakerjaan dinegara-negara berkembang.

Di Indonesia, hakekat pembinaan dan makna esensial dari industri kecil tidaklah dapat dipisahkan dari aspek-aspek normatif yang mendasarinya. Kemakmuran yang menjadi cita-cita dan kehendak politik bagi bangsa Indonesia adalah kemakmuran bagi masyarakat luas, bukan kemakmuran individu atau perseorangan. dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kehendak politik tersebut ditegaskan dalam suatu diktum sebagai berikut:

"Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan; serta bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai

oleh negara untuk dipergunakan bagi kemakmuran rakyat."

Sehubungan dengan itu, dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara ditegaskan mengenai arah pengembangan pembangunan nasional. Implementasinya adalah melalui pendayagunaan yang optimal dari kemampuan dan modal dalam negeri serta pelaksanaan kebijaksanaan yang menunjang upaya peningkatan kemampuan pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah, yakni dengan jalan menciptakan pemerataan kesempatan berusaha bagi segenap lapisan masyarakat. 2)

Melihat kenyataan tingginya tingkat pertumbuhan angkatan kerja sebagai akibat laju pertumbuhan penduduk yang cukup pesat di Indonesia, maka dalam pelaksanaan pembangunan, perluasan kesempatan kerja mendapat perhatian yang cukup besar dari pemerintah. Untuk itu semua sektor yang tercakup dalam ruang lingkup ekonomi termasuk sektor industri, khususnya subsektor industri kecil diusahakan pengembangannya secara maksimal.

Tampaknya terdapat beberapa alasan kuat yang mendasari resistensi dari keberadaan industri kecil dan kerajinan rumah tangga dalam perekonomian Indonesia, yaitu:

1. Sebagian besar populasi industri kecil dan kerajinan rumah tangga beralokasi didaerah pedesaan, sehingga jika dikaitkan dengan kenyataan tanaga kerja yang semakin meningkat serta luas tanah

2) Sekretariat Jenderal MPR-RI. Garis-Garis Besar Haluan Negara (Tap. No. 11/MPR/1983), Jakarta, 1983, Bab III, Sub. 6.

garapan pertanian yang relatif berkurang, industri kecil merupakan jalan keluarnya.

2. Beberapa jenis kegiatan industri kecil dan kerajinan rumah tangga banyak menggunakan bahan baku dari sumber-sumber dilingkungan terdekat (di samping tingkat upah yang murah) telah menyebabkan biaya produksi dapat ditekan rendah.
3. Harga jual yang relatif murah serta tingkat pendapatan kelompok "bawah" yang rendah sesungguhnya merupakan suatu "kondisi berjawab" tersendiri yang memberi peluang bagi industri kecil dan kerajinan rumah tangga untuk tetap bertahan.
4. Tetap adanya permintaan terhadap beberapa jenis komoditi yang tidak diproduksi secara masinal (misalnya batik tulis, anyam-anyaman, barang-barang ukiran dan sebagainya) juga merupakan salah satu aspek pendukung yang kuat. 3)

Menyimak berbagai kegiatan pembinaan industri kecil yang telah dilakukan dari waktu ke waktu, tampak adanya gejala sikap reseptif pemerintah yang semakin meningkat terhadap eksistensi dan peranan industri kecil itu.

Dengan menyadari akan pentingnya kelangsungan hidup dan kehidupan berbagai kegiatan industri kecil, dan sejalan pula dengan strategi peningkatan serta pemerataan hasil pembangunan melalui penyebaran kegiatan usaha kese-

3) Irsan Azhary Saleh, Industri Kecil, Sebuah Tinjauan dan Perbandingan, Jakarta, LP3ES, 1986, Hal. 11.

luruh penjuru kawasan tanah air Indonesia, maka berbagai kebijaksanaan dan langkah pembinaan telah dilaksanakan oleh pemerintah sejak peletakan dasar formil pembangunan kini serta di masa yang akan datang terus dipacu dan dilaksanakan seiring dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Industri kecil memberikan akses untuk bergerak pada dimensi pengembangan usaha yang ditopang oleh sumber-sumber bahan pertanian dan bahan-bahan lokal lainnya, dengan target pemasaran yang umumnya berada dalam lingkup domestik yang terbatas. Atas dasar ini modal yang diperlukan relatif tidak seberapa, sehingga pada gilirannya akan memberi peluang para pengusaha kecil untuk mendirikan unit-unit usaha dengan kadar kecanggihan teknologi produksi yang mudah dijangkau. Tambahan pula keadaan tersebut hanya sampai pada batas-batas tertentu, kegiatan industri kecil dapat mengurangi sebahagian beban impor, sehingga dalam kerangka strategis hal ini berarti menghemat devisa.

Konsepsi tersebut cukup beralasan, sehingga dari padanya diperoleh suatu inti sari, bahwa salah satu alasan utama yang melandasi perihal pentingnya berbagai usaha pengembangan industri kecil, adalah potensi alamiahnya yang besar di dalam memberi andil bagi penyelesaian masalah kesempatan kerja, khususnya di negara kita ini, tampaknya wawasan ini dapat diterima sebagai suatu dasar pemikiran yang memang menampakkan relevansinya dengan masalah kependudukan dan ketenagakerjaan yang rawan dan

cukup kronis.

2.2 Daerah Penelitian

Daerah atau tempat penelitian yaitu di Kotamadya Ujung Pandang, hal ini didasarkan atas beberapa pertimbangan antara lain, bahwa:

- a. Kotamadya Ujung Pandang sebagai Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, juga telah ditetapkan sebagai pusat pengembangan wilayah untuk kawasan Timur Indonesia.
- b. Kotamadya Ujung Pandang dengan kedudukannya yang strategis tersebut, juga sebagai pusat aktivitas pemerintahan, perekonomian, industri dan lain sebagainya, khususnya untuk kawasan regionalnya dan Kawasan Timur Indonesia pada umumnya, dan hal ini tentunya ditunjang dengan sarana dan prasarananya yang cukup memadai.
- c. Terdapatnya berbagai macam ragam dan jenis usaha industri kecil di kota ini, sehingga dapat mewakili aktivitas industri yang berada di Kawasan Regional Propinsi Sulawesi Selatan.

2.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam penulisan ini prosedur pengumpulan datanya dilakukan secara langsung pada obyek penelitian yaitu dari beberapa instansi sebagai berikut: Kantor Departemen Perindustrian, Kantor Departemen Tenaga Kerja dan juga Biro Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan.

Lewat penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca

buku-buku dan literatur yang ada kaitannya dengan penulisan ini.

2.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk di Kotamadya Ujung Pandang.
- b. Jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja di Kotamadya Ujung Pandang.
- c. Jumlah unit usaha, tenaga kerja, investasi, nilai produksi, dan nilai bahan baku pada subsektor industri kecil di Kotamadya Ujung Pandang.

Data sekunder yang digunakan adalah berupa dokumentasi, laporan tertulis yang berupa angka-angka dari berbagai instansi pemerintah sebagaimana disebutkan sebelumnya.

2.5 Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber tersebut, maka dalam pembahasan persoalan penduduk, tenaga kerja dan tingkat perkembangan industri kecil setiap tahunnya di Kotamadya Ujung Pandang, penulis menggunakan metode statistik deskriptif berupa analisis prosentase.

Sedangkan untuk melihat jumlah tenaga kerja yang telah terserap pada subsektor industri kecil dibandingkan dengan seluruh angkatan kerja yang tersedia digunakan rumus Tingkat Kesempatan Kerja, dari rumusan ini dapat diketahui jumlah tenaga kerja yang terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi.

Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:

$$N = \frac{P_b}{P_e} \times 100 \% \quad 4)$$

Dimana :

N = Tingkat Kesempatan Kerja

P_b = Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada subsektor industri kecil pada suatu waktu tertentu.

P_e = Jumlah seluruh angkatan kerja pada suatu waktu tertentu

4) Payaman J. Simanjuntak, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Univ. Indonesia, Jakarta, 1985, Hal. 5.

BAB III
KERANGKA TEORI

3.1 Pengertian Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja

Sebelum diberikan gambaran mengenai perkembangan tenaga kerja khususnya di Kotamadya Ujung Pandang, akan dikemukakan beberapa pengertian tenaga kerja dan angkatan kerja.

Di Indonesia pengertian tenaga kerja belum terdapat konsep pengertian yang seragam. Secara umum tenaga kerja diartikan sebagai sumber daya manusia untuk melakukan pekerjaan.

Pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 Bab I pasal 1 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok mengenai tenaga kerja adalah:

"Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, di dalam maupun diluar hubungan pekerjaan, guna menghasilkan barang-barang maupun jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat." 5)

Pengertian tenaga kerja menurut Sisdjiatmo Kusumosuwidho adalah:

"Jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut." 6)

5) Yudo Swasono dan Endang Sulistyaningsih, Metode Perencanaan Tenaga Kerja BPFE, Yogyakarta, 1983, Hal. 20.

6) Sisdjiatmo Kusumosuwidho, Dasar-Dasar Demografi, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, Hal. 193.

Pengertian tenaga kerja ditinjau dari segi demografi adalah setiap orang atau penduduk yang termasuk kelompok umur 10 tahun ke atas, berarti mulai dari kelompok umur ini sudah dianggap mampu untuk melaksanakan pekerjaan. Sedangkan ditinjau dari segi ekonomi, tenaga kerja diartikan seorang atau jumlah orang yang secara langsung turut serta memberikan pengorbanan yang berupa kemampuan tenaga kerja ataupun pikiran dalam proses produksi, yang berhak menerima upah sebagai balas jasa dari benda dan jasa-jasa yang dihasilkan.

Di Indonesia pengertian tenaga kerja atau man power adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Tiga golongan terakhir walaupun sedang tidak bekerja, mereka dianggap secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja.

Secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dibedakan hanya oleh batas umur. Tujuan dari pemilihan batas umur tersebut adalah supaya defenisi yang diberikan sedapat mungkin menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Setiap negara memilih batas umur yang berbeda karena situasi tenaga kerja dimasing-masing negara juga berbeda.

Di Indonesia, dipilih batas umur minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimum. Pemilihan 10 tahun sebagai batas umur minimum adalah berdasarkan kenyataan bahwa

dalam umur tersebut sudah banyak penduduk berumur muda terutama di desa-desa yang sudah bekerja atau mencari pekerjaan. Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa bilamana seseorang atau penduduk sudah berumur 10 tahun ke atas, maka sejak itu dikategorokan sebagai tenaga kerja.

Akan tetapi tidak semua penduduk yang berumur 10 tahun ke atas digolongkan angkatan kerja. Oleh karena ada sebagian tenaga kerja yang tidak aktif mencari pekerjaan. Tenaga kerja ini digolongkan bukan angkatan kerja.

Jadi pengertian angkatan kerja menurut Yudo Swasono adalah:

"Bagian dari pada penduduk yang masuk usia kerja yang bekerja maupun sementara mencari pekerjaan, yang masih mau dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan." 7)

Sedangkan pengertian angkatan kerja menurut Sisdjiatmo adalah:

"Bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa." 8)

Menurut Sensus Penduduk Tahun 1980, yang dimaksud dengan angkatan kerja ialah:

"Penduduk usia 10 tahun ke atas yang selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab, seperti yang sedang menunggu panen, atau pegawai yang sedang menjalani cuti, disamping itu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang

7) Yudo Swasono, Loc. Cit.,

8) Sisdjiatmo, Loc. Cit.,

menunggu untuk bekerja dan mereka yang sementara mencari pekerjaan." 9)

Sedangkan yang tidak termasuk angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari pekerjaan. jadi mereka ini adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya tidak terlibat atau tidak berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif, yaitu memproduksi barang dan jasa.

Adapun yang tidak termasuk kelompok angkatan kerja terdiri dari tiga golongan yaitu:

1. Golongan yang masih bersekolah, yaitu mereka yang kegiatannya hanya atau terutama bersekolah.
2. Golongan yang mengurus rumah tangga, yaitu mereka yang mengurus rumah tangga tanpa memperoleh upah.
3. Golongan lain-lain, di mana yang termasuk dalam golongan ini ada dua macam yaitu:
 - a. Penerima pendapatan, yakni mereka yang tidak melakukan suatu kegiatan ekonomi tetapi memperoleh pendapatan seperti tunjangan pensiun, bunga simpanan atau surat atas milik dan sebagainya.
 - b. Mereka yang hidupnya tergantung dari orang lain misalnya karena lanjut usia, cacat, dalam penjara atau sakit kronis. 10)

9) Ibid, Hal. 197.

10) Payaman J. Simanjuntak, Pengantar Ekonomi Sumber Daya manusia, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1985, Hal. 6.

3.2 Pengertian Industri dan Industri Kecil

Sebelum melangkah lebih jauh dalam pembahasan ini, maka penulis akan mengemukakan pengertian industri dan industri kecil agar argumen-argumen yang dikemukakan dapat terarah dan dimengerti maksudnya.

Berbicara tentang pengertian industri banyak ahli dan lembaga yang memberikan defenisi atau pengertian, baik secara umum maupun secara khusus.

Pada umumnya industri mempunyai dua pengertian yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas.

1. Industri dalam arti sempit dimaksudkan sebagai kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang sejenis.
2. Industri dalam arti luas berarti kumpulan dari perusahaan pada umumnya.

Selanjutnya penulis akan menyajikan beberapa pengertian tentang industri yang antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut.

Pengertian industri menurut L. Meyers adalah:

"An Industri is a growth of firms producing a homogeneous commodity or a group of commodities that are close substitutes for each other." 11)

Dari defenisi yang dikemukakan diatas dapat diambil suatu makna pengertian bahwa yang dimaksud dengan industri adalah himpunan pabrik yang memproduksi barang-barang yang

11) L. Meyers, *The Element of Modern Economics* (New York; Prentice Hall, Inc., 1966), Hal. 148.

sejenis atau sekelompok barang-barang yang dapat disubstitusikan antara satu dengan yang lain.

Sedangkan Moch. Sadli memberikan pengertian industri sebagai berikut:

"Industri adalah merupakan kumpulan dari perusahaan-perusahaan atau pabrik yang memproduksi suatu barang yang serupa." 12)

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan industri adalah suatu kumpulan dari perusahaan yang melaksanakan kegiatan produktif yaitu menghasilkan barang-barang yang sejenis atau kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang melaksanakan kegiatan produktif dengan menggunakan proses bahan baku yang sama.

Departemen Perindustrian sebagai lembaga yang menangani sektor industri di Indonesia, memberikan pengertian industri yang dituang dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian, menegaskan:

"Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri." 13

Dengan berdasarkan pada pengertian-pengertian yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat ditarik suatu

12) Moch. sadli, *Industrial Economics*, (Bina Kawan Study Club, Universitas Indonesia, Jakarta, 1991), Hal. 49.

13) Departemen Perindustrian Republik Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, Jakarta, 1984, hal. 62.

kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan industri adalah aktivitas (kegiatan) ekonomi yang dikelola oleh manusia dalam usaha untuk meningkatkan kegunaan dari suatu sumber barang, selanjutnya diolah melalui suatu proses produksi agar dapat memenuhi tuntutan akan kebutuhannya, yang terbentuk dalam suatu hasil produksi yang dapat berdaya guna bagi manusia.

Sedang untuk mengetahui perbedaan antara perusahaan industri besar, industri menengah dan industri kecil, maka dapat dilihat dari sudut pemakaian tenaga kerja dan peralatan-peralatan lainnya yang digunakan dalam proses produksi.

Menurut Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 294/M/SK/IV/1972, yang menyangkut tentang penggunaan tenaga kerja dan peralatan yang dipakai dibidang industri, maka dapat diketahui penggolongan industri yang ada di Indonesia menurut besarnya yakni:

1. Industri besar adalah industri yang menggunakan lebih dari 100 orang tenaga kerja tanpa menggunakan mesin, atau menggunakan lebih dari 50 orang tenaga kerja dengan menggunakan mesin.
2. Industri sedang adalah industri yang menggunakan 10 orang sampai 99 orang tenaga kerja tanpa menggunakan mesin, atau menggunakan 10 orang sampai 49 orang tenaga kerja dengan menggunakan mesin.
3. Industri kecil adalah industri yang menggunakan lebih sedikit dari 10 orang tenaga kerja tanpa menggunakan

mesin, atau menggunakan lebih sedikit dari 5 orang tenaga kerja dengan menggunakan mesin.

Selanjutnya berdasarkan sifat dan keadaan industri, maka nampaknya terdapat hal-hal yang dapat membedakan antara satu industri dengan industri lainnya. Perbedaan yang dimaksud adalah dari segi aktivitas yang dijalankannya, yang antara lain dapat disebutkan adalah dari segi penerapan tenaga kerja, peranan out put yang dihasilkan, penguasaan pemanfaatan tingkat teknologi, permodalan yang dimiliki, strategi pemasarannya, cara pengelolaan serta proses produksi yang memiliki karakteristik yang berbeda antara satu industri dengan industri lainnya. Oleh karena itu dengan berdasarkan pada hal-hal tersebut dan sesuai dengan telaahan yang akan dibahas, maka penulis akan membatasi secara khusus pada subsektor industri kecil dalam hubungannya dengan penyerapan tenaga kerja di Kotamadya Ujung Pandang.

Sebelum penulis menguraikan pengertian tentang industri kecil, perlu dijelaskan bahwa batasan industri kecil ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, ini dikarenakan semakin berkembangnya usaha industri kecil tersebut. Pengertian industri kecil yang dipergunakan sebagai kriteria umum oleh Departemen Perindustrian Republik Indonesia yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 133/M/SK/8/1979, Tentang Perubahan terhadap Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Industri Kecil, yang meliputi:

a. Kriteria Fisik.

1. Investasi modal untuk mesin-mesin dan peralatan yang bernilai Rp 70,-juta ke bawah.
2. Pemilik usahanya adalah warga negara Indonesia.
3. Nilai investasi pertenaga kerja tidak lebih dari Rp 650.000,-.

b. Dalam membina industri kecil, maka faktor-faktor lain yang diutamakan adalah:

1. Pemilik adalah golongan ekonomi lemah pada umumnya sekaligus menjadi pimpinan perusahaan dan memerlukan bimbingan kewiraswastaan.
2. Administrasi perusahaan umumnya masih bersifat sederhana dan kurang teratur serta belum terbentuk badan hukum (non corporase based).
3. Tidak berkemampuan untuk mengadakan jaminan guna mendapatkan kredit dari dunia perbankan.
4. Hubungan kerja antara pengusaha dan karyawan belum formil dan masih bersifat kekeluargaan.
5. Pada umumnya sistem pembiayaan dan permodalan belum memungkinkan untuk mengadakan persediaan yang cukup untuk kontinuitas produksi.
6. Proses produksinya masih sederhana dan sebahagian besar masih bersifat tradisional.
7. Mutu produksinya belum tetap dan desainnya kurang mengikuti selera pasar.
8. Lemah dalam pemasaran hasil produk-produk sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam bab V Pedoman dan Pembinaan Industri Kecil dalam Pelita Keempat yang kemudian dilanjutkan dalam Pelita kelima, memberikan klasifikasi industri berdasarkan sasaran prioritas yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Kelompok industri bernilai politik strategis, adalah kelompok industri yang terutama memegang peranan penting secara politis dari pada ekonomi namun didalamnya ada terkandung aspek-aspek pemupukan dana (ekspor).
2. Kelompok industri sekunder (manufacturing), adalah kelompok industri yang tergolong dalam industri-industri pembuatan barang-barang jadi, pemasaran hasil produksi pada umumnya dilakukan semata-mata di dalam negeri atau sebagian untuk diekspor ke luar negeri, di samping itu, kelompok ini juga melayani pasaran konsumen atau pasaran industri.
3. Kelompok industri berdasarkan keterampilan tradisional adalah kelompok industri pada umumnya dilandaskan pada keterampilan yang telah membudaya pada masyarakat setempat, belum menggunakan teknologi tinggi dan menghasilkan barang-barang konsumen yang sederhana.
4. Kelompok industri pedesaan, kelompok industri ini merupakan suatu kegiatan yang bersifat tambahan bagi para petani dan pemasarnya hasilnya (produksi) terbatas atau berkisar pada daerah setempat.
5. Kelompok industri penghasil benda-benda seni, adalah kelompok industri yang dilandasi dengan keterampilan

cita rasa seni yang telah membudaya pada daerah setempat.

Dengan menilik keadaan klasifikasi industri tersebut, maka nampak bahwa kelompok yang terkategoriikan sebagai industri kecil, adalah kelompok tiga, empat, dan lima.

3.3 Penggolongan Industri Menurut Bidang Usahanya

Pola Pengembangan dan pembinaan industri kecil merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan sebagai kebijakan untuk meningkatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia serta sumber daya produksi lainnya dari pemanfaatan secara optimal serta keterkaitan antara sektor industri dengan industri lainnya, maka Departemen Perindustrian Republik Indonesia, menggolongkan industri kecil menurut bidang usahanya dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 175/SK/10/1978 dan Peraturan Pelaksanaanya, antara lain industri kecil dapat dibagi menjadi 4 (empat) golongan yaitu:

1. Golongan industri kecil yang mempunyai kaitan dengan industri menengah dan besar.
2. Golongan industri kecil yang berdiri sendiri dan menghasilkan produk-produk untuk konsumen akhir/langsung.
3. Golongan industri kecil sebagai penghasil barang-barang yang bercitra seni, yang umumnya untuk lingkungan pariwisata.
4. Golongan industri kecil yang berorientasi pada pasaran

lokal yang bersifat pedesaan.

Sehubungan dengan penggolongan industri kecil tersebut, dan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan penggolongan produk-produk yang lebih dari satu golongan, maka sangat perlu untuk diberikan nomor klasifikasi industri menurut International Standard of Industrial Classification (ISIC) di mana standar ini dipergunakan oleh dunia internasional, juga Biro Pusat Statistik dan lembaga-lembaga lainnya, termasuk Departemen Perindustrian dengan menggunakan istilah Kelompok Lapangan Usaha Industri (KLUI). Adapun klasifikasi industri menurut ISIC dapat dilihat pada tabel I berikut ini dengan menggunakan 2 (dua) digit.

TABEL I
 PENGGOLONGAN INDUSTRI MENURUT KODE INTERNASIONAL
 STANDARD OF INDUSTRIAL CLASIFICATION
 (ISIC), DENGAN 2 (DUA) DIGIT

KODE ISIC	PENGGOLONGAN INDUSTRI (CLASIFICATION INDUSTRIAL)
3.1	Industri makanan, minuman dan tembakau.
3.2	Industri tekstil dan pakaian jadi.
3.3	Industri kayu, barang-barang dari kayu termasuk perabot rumah tangga.
3.4	Industri kertas dan barang dari kertas termasuk percetakan dan penjilidan.
3.5	Industri kimia, minyak tanah, batu bara, karet dan plastik.
3.6	Industri barang galian bahan logam, kecuali minyak tanah dan batu bara.
3.7	Industri dasar dan bahan-bahan logam.
3.8	Industri barang-barang logam mesin dan perlengkapannya.
3.9	Industri lain-lainnya.

Sumber : Kantor Departemen Perindustrian Daerah Tingkat II
 Kotamadya Ujung Pandang.

3.4 Manfaat Pembangunan Industri Kecil

sebagaimana kita maklumi bersama bahwa titik berat

pembangunan jangka panjang adalah pembangunan ekonomi dengan sasaran yang diutamakan adalah untuk mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dengan bidang industri serta terpenuhinya kebutuhan masyarakat banyak. Pembangunan jangka panjang harus pula mampu membawa perubahan-perubahan fundamental dalam struktur ekonomi sehingga produksi nasional yang bersumber dari luar sektor pertanian akan merupakan bagian yang semakin besar.

Dengan memperhatikan sasaran dari pada pembangunan jangka panjang khususnya dalam bidang ekonomi, salah satu sektor yang cukup menunjang di dalam ikut menentukan pembangunan di Indonesia khususnya dibidang ekonomi adalah industri. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan industri dapat meningkatkan pendapatan dan produksi di sektor industri, yang tak lain diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri sehingga mengurangi ketergantungan terhadap impor dan diharapkan pula dapat meningkatkan ekspor hasil-hasil industri itu sendiri serta dapat memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja yang setiap tahunnya mendesak untuk memperoleh lapangan pekerjaan.

Mengingat pertambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun meningkat dengan terus-menerus, menyebabkan bertambahnya pula tenaga kerja dan angkatan kerja, dialin pihak kurangnya lapangan pekerjaan, sehingga akan menyebabkan bertambahnya pengangguran. Sehubungan dengan masalah tersebut di atas, perluasan kesempatan kerja perlu mendapat penanganan yang lebih baik di dalam pelaksanaan pem-

bangunan yang sedang digalakkan sekarang ini dan dimasa masa yang akan datang. Oleh sebab itu perlu diambil suatu kebijaksanaan dan langkah-langkah perluasan kesempatan kerja yang bersifat menyeluruh dan terpadu melalui pengarah-an investasi yang berorientasi pada perluasan kesempatan kerja.

Salah satu langkah yang perlu diambil yaitu dengan mengembangkan industri kecil, di mana industri kecil ini merupakan industri yang padat karya sehingga memungkinkan untuk menyerap tenaga kerja. Dalam pengembangan industri kecil ini bukan hanya pembangunannya yang harus ditingkatkan tetapi juga pertumbuhannya yang harus dipercepat sehingga mampu mempercepat terciptanya lapangan kerja baru.

Selanjutnya apabila ditinjau dari segi ketenagakerjaan, maka industri kecil mempunyai kelebihan-kelebihan antara lain:

A. Dari segi makro:

1. Industri kecil merupakan lapangan kerja bagi tenaga kerja musiman untuk meningkatkan pendapatannya.
2. Memberikan kesempatan kerja bagi anak-anak muda yang putus sekolah dan yang tidak mempunyai pengalaman kerja selain sektor pertanian utamanya tenaga kerja kasar.
3. Industri kecil merupakan tempat pendidikan dan latihan bagi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri-industri besar

4. Industri kecil memiliki potensi untuk menjadi industri besar.
5. Industri kecil yang tumbuh di desa-desa dapat mencegah terjadinya perpindahan dari desa ke kota besar (urbanisasi) dengan segala efeknya.

B. Dari segi mikro:

1. Personil relatif kecil, sehingga hubungan antara pimpinan dan karyawan sangat baik.
2. tenaga kerja yang dilibatkan biasanya dari kalangan keluarga sendiri atau sedaerah, sehingga mempunyai cita-cita dan kepentingan yang sama.
3. Tidak terlalu membutuhkan tenaga kerja spesialis yang terlalu tinggi artinya keahlian dapat diperoleh setelah bekerja sambil belajar.

Dari segi ekonominya industri kecil, memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut:

1. Modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar.
2. Tidak membutuhkan teknologi yang terlalu besar harganya.
3. Tidak terlalu lama membutuhkan waktu, yaitu mulai dari penanaman modal sampai adanya hasil produksi.
4. Produksi secara langsung melayani masyarakat dan umumnya terletak pada sumber bahan baku.
5. Sanggup melayani permintaan konsumen dan menyesuaikan diri dengan pola permintaan pasar, serta sanggup melayani pesanan dari industri-industri besar.
6. Tidak terlalu banyak mengandung resiko terhadap kerusa-

esin dan tidak banyak membutuhkan devisa.

7. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan relatif sedikit.

Selanjutnya dikatakan oleh R.B. Suhartono bahwa strategi industrialisasi haruslah memberikan arah perkembangan industri agar terbentuk suatu struktur industri yang makin tangguh. Demikian halnya dengan industri kecil yang termasuk di dalamnya industri kerajinan rumah tangga, merupakan bagian dari strategi industrialisasi haruslah diarahkan langsung pada pemecahan masalah pemerataan. Industrialisasi yang tidak mempunyai dampak langsung mengurangi kemiskinan bukanlah strategi yang baik.

Untuk itulah kebijaksanaan industrialisasi harus terutama diarahkan pada pengembangan industri kecil dan kerajinan rumah tangga, khususnya di desa dengan memprioritaskan penggunaan barang-barang lokal serta teknologi sederhana. Industri-industri kecil tersebut harus dikembangkan untuk dapat berorientasi kepada pasar yang lebih luas (dari pasar lokal ke pasar regional), kemudian kepada pasar dengan lingkup nasional, dan lebih baik lagi jika dapat menjangkau pasar internasional. 14)

Agar dapat menjangkau seperti yang telah disebutkan di atas, maka keterkaitan dengan sektor industri besar dan menengah dengan sektor-sektor lain jelas perlu dikembangkan, sehingga nantinya dapat memperluas dan meningkatkan potensi pertumbuhan pasar bagi hasil-hasil industri kecil

14) R.B. Suhartono, Polas dan Struktur Industri Indonesia, cetakan I, Jakarta, CSIS, 1982, Hal. 12.

serta bisa menjadi sumber kemajuan dan inovasi dalam cara berproduksi. Strategi industri kecil harus pula dilandaskan pada program pengembangan teknologi tepat guna yang dapat menciptakan kesempatan kerja, sekaligus dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas kerja.

BAB IV
P E M B A H A S A N

4.1 Perkembangan Penduduk

Perkembangan dan pertumbuhan penduduk merupakan masalah yang sangat penting dan kompleks bagi setiap negara di dunia ini. Baik di negara-negara maju terlebih lagi di negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia.

Pertumbuhan penduduk dalam arti peningkatan jumlah penduduk sebagai salah satu sumber daya ekonomi, merupakan potensi ekonomi kontradiktif, oleh karena di satu pihak sumber daya manusia tersebut dapat dijadikan sebagai modal pembangunan, akan tetapi di lain pihak dapat merupakan beban yang justru dapat menghambat upaya pencapaian keberhasilan Pembangunan Nasional, khususnya dilihat dari sisi pembangunan ekonomi.

Sebaliknya apabila pertumbuhan penduduk itu tidak terkendalikan dan menyebar tidak merata, maka dapat dipastikan bahwa pengalokasiannya untuk dapat berfungsi sebagai modal dasar untuk pembangunan dengan maksud bahwa tenaga kerja yang produktif akan terhalang bahkan dapat memperbesar tingkat pengangguran. Maka penambahan penduduk tersebut akan merupakan beban pembangunan, karena adanya ketidak seimbangan antara jumlah penduduk dengan sumber-sumber kebutuhan hidup yang pokok bagi penduduk itu sendiri, seperti: sandang, pangan, perumahan, pendidikan, dan

kesehatan serta masih terbatasnya lapangan kerja dan sebagainya.

Menilik tentang keadaan yang dapat ditimbulkan dari adanya perkembangan penduduk tersebut, maka pada umumnya terjadi di negara-negara sedang berkembang, yang merupakan salah satu ciri dari kelompok negara-negara berkembang dalam masa pembangunan ekonominya, seperti yang dikemukakan oleh Simon Kuznets dalam bukunya yang berjudul "Modern Economic Growth", bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat itu merupakan suatu ciri dan kenyataan dari pertumbuhan ekonomi modern. 15)

Ilustrasi dari perkembangan penduduk terhadap pembangunan ekonomi telah pula dikemukakan oleh Sadono Sukirno dalam bukunya yang berjudul "Ekonomi Pembangunan", mengatakan bahwa:

"Di negara-negara sedang berkembang, penduduk lebih merupakan penghambat kepada pembangunan ekonomi. Ciri-ciri negara sedang berkembang adalah perkembangan penduduk menimbulkan lebih banyak akibat-akibat negatif terhadap pembangunan, pengangguran yang jumlahnya sudah berlebihan, tingkat pendapatan perkapita yang rendah, jaringan pengangkutan yang masih belum sempurna, terdapatnya kekurangan tenaga terdidik dan usahawan, dan masih tetap terbatasnya dana untuk penanaman modal merupakan beberapa ciri penting negara-negara sedang berkembang yang menyebabkan pertumbuhan penduduk lebih merupakan pengham-

15) Simon Kuznetz, Modern Economic Growth, Rate Structure and spread (New Delhi I; Oxford and Publishing CO; 66 Japanth, December, 1965), Hal. 34.

penduduk, maka ada tiga komponene utama yang menentukan pertambahannya yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. Selisih antara banyaknya kelahiran di atas kematian untuk satu jangka waktu tertentu misalnya setahun merupakan pertumbuhan penduduk secara alami, sedang migrasi dapat pula menambah atau mengurangi penduduk di suatu daerah tertentu. Ketiga komponen tersebut merupakan faktor yang menentukan besar kecilnya dalam arti jumlah penduduk di suatu daerah tertentu. Penduduk akan bertambah jumlahnya apabila tingkat kelahiran lebih besar dari tingkat kematian setelah dikurangi dengan emigrasi dan ditambah dengan imigrasi.

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa selama jangka waktu lima tahun terjadi kenaikan atau penambahan penduduk di Kotamadya Ujung Pandang, yaitu sebanyak 187.371 jiwa atau dari 812.957 jiwa pada tahun 1988 menjadi 1.000.328 jiwa pada tahun 1992. Untuk lebih jelasnya data tentang jumlah penduduk, perkembangannya dan perkembangan relatifnya dalam tahun 1988 - 1992 di Kotamadya Ujung Pandang dapat dilihat dari tabel II.

Pada tabel terlihat dari tahun 1988 - 1989 terjadi penambahan penduduk sebanyak 9.056 jiwa atau perkembangan relatifnya sebesar 1,11 %. Selanjutnya pada tahun berikutnya terjadi penambahan sebesar 21.556 jiwa dengan perkembangan relatif 2,62 % yang berarti meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 1991 terjadi penambahan penduduk sebanyak 100.803 jiwa dengan perkembangan rela-

tifnya sebesar 11,95 % yang berarti meningkat lebih besar dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 1992 pertambahan penduduk hanya sebesar 55.956 jiwa dengan perkembangan relatif 5,93 % yang berarti pertambahannya menurun dibanding dengan tahun 1991. Secara keseluruhan perkembangan penduduk selama kurun waktu lima tahun tersebut adalah rata-rata bertambah sebesar 46.842 jiwa atau perkembangan relatifnya sebesar 5,40 % setiap tahunnya.

TABEL II
PEKEMBANGAN PENDUDUK DI KOTAMADYA
UJUNG PANDANG TAHUN 1988 - 1992

T A H U N	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	P E R K E M B A N G A N	
		ABSOLUT (JIWA)	RELATIF (%)
1 9 8 8	812.957	-	-
1 9 8 9	822.013	9.056	1,11
1 9 9 0	843.569	21.556	2,62
1 9 9 1	944.372	100.803	11,95
1 9 9 2	1.000.328	55.956	5,93

Sumber: Kantor Statistik Propinsi Sulawesi Selatan, Kota madya Ujung Pandang Dalam Angka, Berbagai Seri.

Data : diolah penulis.

Dalam pada itu penyebaran penduduk disetiap wilayah kecamatan tentunya berbeda, hal tersebut disebabkan oleh situasi dan keadaan wilayahnya. Untuk mengetahui perincian jumlah penduduk pada setiap kecamatan dapat ditelusuri dari penyajian tabel dibawah ini.

TABEL III
JUMLAH DAN KEPADATAN PENDUDUK PER KECAMATAN
DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG TAHUN 1992

NO. KECAMATAN	LUAS (Km ²)	DISTRIBUSI L. (%)	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	KEPADATAN PER Km ² . (Jiwa)
01. Mariso	1,82	1,04	58.901	32.363
02. Mamajang	2,25	1,28	71.954	31.980
03. Makassar	2,52	1,43	99.055	39.308
04. Ujung Pandang	2,63	1,50	40.456	15.382
05. Wajo	1,99	1,13	47.023	23.630
06. Bontoala	2,10	1,19	68.388	32.567
07. Ujung Tanah	5,94	3,38	47.906	88.065
08. Tallo	5,83	3,32	117.771	20.201
09. Panakkukang	11,19	23,43	159.692	3.877
10. Tamalate	29,44	16,75	211.480	7.183
11. Biringkanaya	80,06	45,55	77.702	971
JUMLAH	175,77	100,00	1.000.328	5.691

Sumber: Kantor Statistik Propinsi Sulawesi Selatan; Kota madya Ujung Pandang Dalam Angka 1992.

Nampak pada tabel III tersebut, bahwa penyebaran penduduk pada setiap kecamatan di Kotamadya Ujung Pandang adalah tidak merata. Ditilik dari segi kepadatan jumlah

penduduk, maka kecamatan dengan nomor urut 01 sampai dengan 06 merupakan wilayah yang cukup padat penduduknya, hal ini dapat ditelusuri dari luas wilayahnya yang relatif kecil dibanding dengan luas wilayah kecamatan dengan nomor urut 07 sampai dengan 11 yang relatif cukup luas. Dan nampaknya salah satu faktor penyebab dari kepadatan penduduk dalam wilayah kecamatan termaksud, adalah letaknya yang cukup bahkan sangat strategis di pusat kota. Sedangkan di wilayah kecamatan yang relatif kurang padat penduduknya terletak disekitar pinggiran kota. Sehingga dengan keadaan tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa dengan luas sebesar 175,77 Km² Kotamadya Ujung Pandang pada tahun 1992 telah dihuni sebanyak 1.000.328 jiwa penduduk dengan rata-rata kepadatan penduduk per Km², adalah sebanyak 5.691 jiwa pada tahun pengamatan yang sama.

4.2 Perkembangan Tenaga Kerja

Dengan berdasarkan pengertian tenaga kerja pada bab III terdahulu, maka dapatlah disimpulkan bahwa bilamana seseorang atau penduduk sudah berada pada kelompok umur 10 tahun ke atas, maka dengan mudah dapat kita ketahui besarnya jumlah tenaga kerja yang ada di Kotamadya Ujung Pandang dari tahun ke tahun seperti yang nampak pada tabel IV, yaitu jumlah penduduk Kotamadya Ujung Pandang menurut kelompok umur.

Berdasarkan tabel IV tersebut serta pengertian dari tenaga kerja yang ditinjau dari segi demografi, maka penulis dapat membuat lagi satu tabel yaitu tabel V, mengenai jumlah tenaga kerja di Kotamadya Ujung Pandang pada tahun 1988 - 1992 yang nantinya akan disajikan pada halaman berikut. Dengan melihat tabel V tersebut, kemudian melihat jumlah penduduk secara keseluruhan seperti pada tabel IV maka terlihat bahwa pada tahun 1988 jumlah tenaga kerja tercatat sebesar 590.153 orang, dari jumlah penduduk sebesar 812.957 jiwa, pada tahun 1989 dari penduduk sebesar 822.013 orang, maka tercatat tenaga kerja sebanyak 596.714 orang, berarti mengalami perkembangan sebesar 6.561 orang atau 1,11 %, pada 1990 jumlah tenaga kerja telah meningkat lagi menjadi 661.113 orang dari penduduk sebanyak 843.569 jiwa atau mengalami perkembangan sebesar 64.419 orang tenaga kerja atau dengan prosentase 10,80 %. Setelah itu pada tahun 1991 dari penduduk yang tercatat sebanyak 944.372 jiwa, maka tercatat tenaga kerja sebanyak 738.889 orang tenaga kerja, berarti terjadi penambahan jumlah tenaga kerja sebanyak 77.756 atau 11,76 %. Sedang pada tahun 1992 dari penduduk sebesar 1.000.328 jiwa tercatat tenaga kerja sebanyak 782.670 orang, ini berarti bertambah lagi sebanyak 43.781 atau sebesar 5,93 %. Hal ini menunjukkan bahwa sejak tahun 1988 hingga tahun 1992 jumlah tenaga kerja di Kotamadya Ujung Pandang mengalami perkembangan sebanyak 192.517 orang tenaga kerja.

TABEL IV
PENDUDUK KOTAMADYA UJUNG PANDANG
MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 1988 - 1992

KELOMPOK UMUR	TAHUN 1988	TAHUN 1989	TAHUN 1990	TAHUN 1991	TAHUN 1992
0 - 4	112.832	113.974	89.631	101.248	107.247
5 - 9	109.972	111.325	92.805	104.235	110.411
10 -14	98.212	99.980	93.334	105.510	110.702
15 -19	100.450	101.710	112.653	127.215	134.753
20 -24	102.023	102.846	119.270	133.943	141.879
25 -29	70.447	71.028	89.692	100.321	106.265
30 -34	51.687	52.219	61.707	69.107	73.202
35 -39	46.736	47.244	45.548	50.844	53.857
40 -44	35.233	35.572	36.089	40.084	42.459
45 -49	26.507	26.724	29.457	32.561	34.459
50 -54	22.099	22.290	23.618	25.981	27.521
55 -59	11.551	11.609	16.788	18.387	19.477
60 -64	9.907	9.982	13.337	14.571	15.434
65 +	15.391	15.456	19.640	21.365	22.631
JUMLAH	812.957	822.013	843.569	944.372	1.000.328

Sumber: Kantor Biro Pusat Statistik Propinsi Sul Sel.

TABEL V
JUMLAH TENAGA KERJA DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG
PADA TAHUN 1988-1992

TAHUN	JUMLAH TENAGA KERJA	PERKEMBANGAN	
		JUMLAH	PROSENTASE
1988	590.153	-	-
1989	596.714	6.561	1,11
1990	661.133	64.419	10,80
1991	738.889	77.756	11,76
1992	782.670	43.781	5,93

Sumber: Tabel IV

Bila dilihat tenaga kerja berdasarkan tabel V menurut kelompok umur, maka jumlah tenaga kerja yang paling menonjol dari segi jumlahnya pada kelompok umur 20 - 24 tahun, menyusul kelompok umur 15 - 19 tahun kemudian kelompok umur 10 - 14 tahun. ini berarti bahwa tenaga kerja yang berada di Kotamadya Ujung Pandang pada umumnya bertumpuk pada kelompok umur muda. Namun bila ditinjau lebih dalam lagi, maka ternyata tidak semua penduduk usia kerja tersebut ada dalam angkatan kerja.

Yang dimaksud dengan angkatan kerja secara umum, adalah mereka yang sedang bekerja ingin bekerja, dan sedang aktif mencari pekerjaan. Sedang penduduk usia kerja yang tidak tergolong sebagai angkatan kerja umumnya adalah yang masih sekolah, orang yang sudah pensiun, yang cacat dan selebihnya sebagai penganggur.

Menurut Biro Pusat Statistik, yang dimaksud dengan angkatan kerja dalam sensus penduduk tahun 1980 adalah: penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab, dan mereka mencari pekerjaan sedangkan yang tidak termasuk angkatan kerja, adalah mereka yang masih sekolah dan tidak bekerja, serta wanita yang mengurus rumah tangga, pensiunan dan mereka yang berusia lanjut atau karena keadaan fisiknya yang tidak kuat bekerja serta tidak mencari pekerjaan.

Dengan melihat pengertian di atas, maka antara tenaga

kerja dan angkatan kerja mempunyai pengertian yang berbeda. Namun di Indonesia masih terdapat bermacam-macam pengertian dan tafsiran tentang kedua hal tersebut di atas. Ada yang berpendapat bahwa pengertian tenaga kerja itu adalah sama artinya dengan angkatan kerja, yang mana kedua istilah ini sebenarnya adalah terjemahan dari bahasa Inggris "Man power" untuk tenaga kerja dan "Labour force" untuk angkatan kerja.

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dinyatakan bahwa, masalah kependudukan merupakan masalah yang penting dan jangka panjang, dimana pemecahannya memerlukan waktu yang lama. Pertambahan penduduk berkaitan langsung dengan angkatan kerja, sedang pertambahan angkatan kerja akan memerlukan penyediaan lapangan kerja. Dalam penyediaan lapangan kerja, tidak saja investasi yang dibutuhkan, tetapi situasi politik dalam negeri yang stabil, hubungan internasional yang baik serta partisipasi masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan.

Dalam penyediaan lapangan kerja, kadang-kadang sering terjadi ketidakseimbangan antara yang dibutuhkan dengan yang disediakan. Yang dibutuhkan jauh lebih tinggi dari pada yang disediakan, terlebih lagi lapangan pekerjaan yang sesuai dan memadai.

Dengan demikian akan timbul ketimpangan-ketimpangan atau kepincangan-kepincangan yang disebabkan antara laju pertumbuhan kesempatan kerja disatu pihak dengan laju pertumbuhan angkatan kerja dilain pihak. Akibatnya muncul

pengangguran, dimana mereka belum memperoleh lapangan kerja.

Pengangguran menimbulkan banyak masalah sosial ataupun ekonomi. Tingginya tingkat pengangguran akan menimbulkan suatu indikasi ketidakmampuan ekonomi untuk bekerja secara penuh, atau telah terjadi ketidaksempurnaan mekanisme dari perekonomian. Akibatnya akan nampak kemiskinan meraja lela, dilihat dari sudut sosial akan lebih banyak terutama apabila dikaitkan dengan stabilitas sosial masyarakat. Selama ketimpangan terjadi secara terus menerus, agaknya sulit untuk diperoleh suatu keadaan ekonomi yang memadai.

Perkembangan angkatan kerja mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sesuai dengan perkembangan tenaga kerja. Untuk mengetahui jumlah angkatan kerja di Kotamadya Ujung Pandang pada tahun 1988 - 1992, maka penulis akan menyajikan pada tabel VI berikut ini.

TABEL VI
PERKEMBANGAN ANGKATAN KERJA
DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG TAHUN 1988-1992

TAHUN	JUMLAH ANGKATAN KERJA	PERKEMBANGAN	
		JUMLAH	PROSENTASE
1988	249.423	-	-
1989	267.622	18.199	7,30
1990	287.188	19.566	7,31
1991	308.234	21.046	7,33
1992	330.820	22.586	7,33


Sumber: Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Ujung Pandang
Data : diolah penulis.

Dari tabel di atas nampak bahwa pada tahun 1988 jumlah angkatan kerja sebesar 249.423 orang meningkat menjadi 267.622 orang pada tahun 1989 ini menunjukkan adanya pertambahan sebanyak 18.199 orang atau 7,30 %. Tahun 1990 angkatan kerja berjumlah 287.188 orang, bertambah sebanyak 19.566 orang atau 7,31 % kemudian pada tahun 1991 angkatan kerja berjumlah 308.234 orang, perkembangannya sebanyak 21.046 orang atau 7,33 %. Untuk tahun 1992 jumlah angkatan kerja sebanyak 330.820 orang, dan perkembangannya sebesar 7,33 % atau sebanyak 22.586 orang. Secara keseluruhan perkembangan jumlah angkatan kerja setiap tahunnya meningkat rata-rata 7,32 %.

4.3 Masalah Kesempatan Kerja

seperti yang telah diuraikan pada bab terdahulu, bahwa setiap tahunnya terjadi kenaikan/pertambahan penduduk khususnya pada kelompok usia kerja. ini berarti akan membawa pengaruh, baik dari segi ekonomi maupun dari segi sosial. Dan yang paling terasa pengaruhnya adalah dapat mengakibatkan terjadinya pengangguran yang semakin besar jika sekiranya tidak diimbangi dengan perluasan kerja secara menyeluruh disemua sektor.

Memang tak dapat disangkal bahwa setiap negara atau daerah pasti terdapat sekelompok manusia yang menganggur, baik yang kentara maupun yang tidak kentara. Hal ini disebabkan oleh karena tidak adanya keseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan lapangan kerja yang ada,



dan dilain pihak bertambahnya angkatan kerja baru erat hubungannya dengan pertambahan penduduk setiap tahun, tanpa diimbangi dengan perluasan lapangan kerja. Jadi pertambahan penduduk tidak seimbang dengan perluasan kesempatan kerja yang ada.

Diperkirakan bahwa tingkat pengangguran di kota-kota adalah lebih besar dari pada yang ada di desa. Para penganggur yang ada di kota umumnya adalah tenaga yang baru menyelesaikan pendidikannya dan mencari pekerjaan untuk pertama kali. Di samping itu kebanyakan pula yang putus sekolah serta tidak sekolah, kurang mampu dalam status ekonomi untuk melanjutkan pendidikan. Penyebab lain dari bertambahnya pengangguran di kota adalah adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota (urbanisasi), dengan harapan di kota bisa dapat pekerjaan, namun kenyataannya, mereka menganggur.

Melihat kenyataan di atas maka diperlukan kebijaksanaan pembangunan dan perluasan kesempatan kerja yang mengutamakan usaha-usaha yang dapat menanggulangi pengangguran dan memberantas kemiskinan. selain dari pada itu perluasan sarana pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan perlu dilaksanakan agar jumlah tenaga kerja pada usia sekolah dapat kembali memasuki sekolah sehingga memperkecil jumlah tenaga kerja usia sekolah dalam pasaran kerja. Atau dengan kata lain pengangguran dapat diperkecil.

Untuk itu kebijaksanaan dalam menanggulangi pengangguran dapat ditempuh dalam beberapa cara seperti:

1. Perluasan kesempatan kerja
2. Perluasan sarana pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan.

Menurut Soemitro Djojohadikusumo bahwa pada dasarnya ada dua cara untuk meluaskan kesempatan kerja, yaitu:

1. Pengembangan industri, terutama jenis industri yang bersifat padat karya (labour intensive) yang dapat menyerap relatif banyak tenaga kerja dalam proses produksinya, dan
2. Melalui berbagai proyek pekerjaan umum seperti pembuatan jalan, bendungan, jembatan dan sebagainya. 17)

Sedang perluasan sarana pendidikan menurut beliau, ialah memperbesar jumlah murid pada usia sekolah dan usaha ini dapat dicapai dua tujuan yaitu:

1. Memperkecil jumlah tenaga kerja pada usia sekolah yang memasuki pasaran tenaga kerja.
2. Peningkatan mutu tenaga kerja melalui pendidikan dan latihan keterampilan. 18)

Perluasan kesempatan kerja secara produktif tidak berarti hanya penciptaan lapangan kerja baru, melainkan pula peningkatan produktivitas kerja pada umumnya, di

17) Soemitro Djojohadikusumo, Indonesia Dalam Perkembangan Dunia kini dan Masa Akan datang, Lembaga Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta, 1975, Hal. 34.

18) Soemitro Djojohadikusumo, Masalah Penduduk dan Kesempatan Kerja dalam Prospektif Jangka Panjang, Prasaran Menteri Negara Riset untuk Seminar Nasional Tentang: Kependudukan dan Tenaga Kerja, Jakarta, 14 Agustus 1977, Hal. 11.

sertai pemberian upah yang sepadan dengan apa yang dikerjakan oleh pekerja tersebut, agar upah yang diterima dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi rumah tangga keluarganya.

Sejalan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Seomiro Djojohadikusumo dalam hal perluasan kesempatan kerja, maka pembangunan industri-industri kecil yang merupakan industri padat karya perlu digalakkan diseluruh wilayah tanah air, sehingga nantinya dapat menyerap tenaga kerja.

Dalam hubungan ini, maka harus ditelaah masing-masing masalah yang menyangkut kependudukan dan kesempatan kerja. Agar dapat dicapai trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan, pemerataan dan kestabilan, maka diperlukan kebijaksanaan negara yang dapat mempengaruhi pola dan arah perkembangan masa depan dan harus mengutamakan untuk menanggulangi pengangguran dan pemberantasan kemiskinan.

4.4 Keadaan Perkembangan Industri Kecil

Industri kecil merupakan usaha ekonomi yang tersebar luas di Indonesia, sebagian besar dilakukan oleh golongan ekonomi lemah. Oleh karenanya industri kecil dalam pembangunan nasional dititik beratkan untuk dapat meningkatkan peranannya dalam pemerataan, baik dalam perluasan penyerapan tenaga kerja, perluasan kesempatan berusaha maupun peningkatan pendapatan masyarakat.

Dalam rangka peningkatan penerimaan devisa serta penghematan devisa, industri kecil diharapkan dapat ber-

peran dalam penyediaan produk substitusi impor dan peningkatan produk ekspor.

Dalam pembangunan industri kecil terus diupayakan agar dapat tercipta kaitan erat dengan industri menengah dan industri besar, sehingga pengembangan industri besar dan menengah secara langsung merangsang pembangunan industri kecil, yang pada gilirannya akan menunjang terwujudnya pendalaman dan pematapan struktur industri nasional.

Perkembangan industri kecil ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya berapa besar investasi yang akan digunakan, berapa jumlah unit usaha, berapa besar tenaga kerja yang dipekerjakan serta berapa besar produksi yang dihasilkan.

Untuk itu pada pembahasan ini penulis akan memaparkan keadaan industri kecil di Kotamadya Ujung Pandang dilihat dari beberapa faktor diatas, untuk mengetahui apakah industri kecil tersebut mengalami perkembangan atau sebaliknya.

4.4.1 Jumlah Unit Usaha

Keadaan perkembangan industri kecil dilihat dari jumlah perusahaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

TABEL VII
 PERKEMBANGAN UNIT USAHA PADA INDUSTRI KECIL
 DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG
 TAHUN 1988 - 1992

TAHUN	JUMLAH UNIT USAHA	PERKEMBANGAN (%)
1988	1.909	-
1989	1.951	2,20
1990	1.966	0,76
1991	2.023	2,90
1992	2.111	4,35

Sumber: Kantor Departemen Perindustrian Kotamadya Ujung Pandang.

Data : diolah penulis.

Pada tabel tersebut nampak bahwa jumlah industri kecil yang ada di Kotamadya Ujung Pandang pada tahun 1988 adalah 1.909 unit usaha meningkat menjadi 1.951 pada tahun 1989, berarti ada kenaikan sebesar 2,20 %. Selanjutnya tahun 1990 berjumlah 1.966 unit usaha artinya meningkat sebesar 0,76 %. Untuk tahun 1991 meningkat menjadi 2.023 unit usaha berarti ada perkembangan sebesar 2,90 %. Sedangkan tahun 1992 menunjukkan peningkatan yang lebih besar dari tahun tahun sebelumnya menjadi 2.111 unit usaha berarti meningkat sebanyak 88 unit usaha atau sebesar 4,35 %. Bila dilihat secara keseluruhan, maka perkembangan jumlah unit usaha selama kurun waktu lima tahun adalah rata-rata bertambah sebesar 2,55 % setiap tahunnya.

4.4.2 Jumlah Tenaga Kerja

Keadaan industri kecil di Kotamadya Ujung Pandang dari segi penyerapan tenaga kerja dari tahun 1988 - 1992 menunjukkan adanya perkembangan. keadaan ini tentunya yang diharapkan oleh pemerintah di dalam usaha penciptaan kesempatan kerja dan mengatasi masalah ketenagakerjaan di Kotamadya Ujung Pandang.

Adapun perkembangan tenaga kerja pada subsektor industri kecil dari tahun 1988 - 1992, akan penulis sajikan pada tabel berikut ini.

TABEL VIII
PERKEMBANGAN TENAGA KERJA PADA INDUSTRI KECIL
DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG
TAHUN 1988 - 1992

TAHUN	JUMLAH TENAGA KERJA	PERKEMBANGAN (%)
1988	16.511	-
1989	16.988	2,89
1990	17.426	2,58
1991	17.477	0,29
1992	17.697	1,56

Sumber: Kantor Departemen Perindustrian Kotamadya Ujung Pandang.

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa pada tahun 1988 jumlah tenaga kerja yang bekerja pada industri kecil adalah 16.511 orang, kemudian pada tahun 1989 meningkat menjadi 16.988 orang atau naik sebesar 2,89 %. Pada tahun 1990 jumlah tenaga kerja yang ada disektor industri kecil meningkat menjadi 17.426 orang atau mengalami kenaikan sebesar 2,58 %. Untuk tahun 1991 masih tetap memperlihatkan kenaikan walaupun hanya sebesar 0,29 %, atau sebanyak 17.477 orang. Dan tahun 1992 tenaga kerja yang diserap meningkat menjadi 17.697 orang atau berkembang sebesar 1,26 %. Secara keseluruhan perkembangan jumlah tenaga kerja setiap tahunnya meningkat rata-rata 1,83 %.

4.4.3 Nilai Investasi

Dalam mengusahakan perkembangan suatu kegiatan usaha apapun bentuknya, utamanya yang menyangkut bidang ekonomi, maka salah satu faktor pendukung yang sangat penting di dalam pengelolaan usaha tersebut adalah faktor modal.

Investasi adalah modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam menjalankan suatu usaha, tanpa investasi tersebut suatu usaha tidak dapat berjalan lancar.

Olehnya itu pemerintah dewasa ini dalam pemberian kredit kepada pengusaha, lebih memprioritaskan kepada pengusaha ekonomi lemah dan mengefektifkan lembaga-lembaga perkreditan di samping lembaga ekonomi lainnya seperti koperasi unit desa (KUD) dengan tujuan membantu para pengusaha ekonomi lemah dibidang permodalan dan pemasaran hasil-hasil produksinya, sehingga dengan adanya sarana

pembantu itu serta dukungan yang kuat, maka industri-industri kecil diharapkan berkembang keseluruh pelosok wilayah Indonesia.

Dalam pembinaan dan pengembangan industri kecil di Kotamadya Ujung Pandang terlihat pula adanya peningkatan jumlah investasi setiap tahunnya, seperti yang terjadi pada unit usaha dan tenaga kerja.

Untuk mengetahui perkembangan investasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL IX
PERKEMBANGAN JUMLAH INVESTASI PADA INDUSTRI
KECIL DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG
TAHUN 1988 - 1992

TAHUN	NILAI INVESTASI (Rp. 000)	PERKEMBANGAN (%)
1988	25.305.432	-
1989	28.066.660	10,91
1990	29.806.463	6,20
1991	31.520.390	5,75
1992	32.495.823	3,09

Sumber: Kantor Departemen Perindustrian Kotamadya Ujung Pandang.

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah investasi pada subsektor industri kecil mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tahun 1988 jumlah investasi sebesar Rp. 25.305.432.000,- kemudian pada tahun 1989 naik menjadi Rp. 28.066.660.000,- artinya berkembang sebesar 10,91 %.

Nilai produksi yang dihasilkan pada tahun 1988 adalah sebesar Rp. 82.622.982.000,- meningkat menjadi sebanyak Rp. 85.995.432.000,- berarti mengalami perkembangan sebesar 4,08 %, untuk tahun 1989. Tahun 1990 meningkat menjadi Rp. 98.640.678.000,- artinya naik sebesar 4,24 %. Untuk tahun 1990 terjadi peningkatan yang lebih besar dari tahun sebelumnya sebanyak Rp. 97.014.112.000,- atau berkembang sebesar 8,23 %. Sedangkan pada tahun 1992 tetap mengalami kenaikan sebesar Rp. 102.993.115.000,- atau perkembangannya hanya sebesar 6,16 % dari tahun sebelumnya. Dengan memperhatikan tabel di atas jumlah peningkatan nilai produksi setiap tahunnya meningkat rata-rata 5,68 %.

4.4.5 Nilai Bahan Baku

Penggunaan bahan baku juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seperti terlihat pada tabel berikut:

TABEL XI
PERKEMBANGAN NILAI BAHAN BAKU PADA INDUSTRI
KECIL DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG
TAHUN 1988 - 1992

TAHUN	NILAI BAHAN BAKU (Rp.000)	PERKEMBANGAN (%)
1988	51.658.544	-
1989	53.562.836	3,69
1990	55.090.784	2,85
1991	63.358.673	15,01
1992	67.209.694	6,08

Sumber: Kantor Departemen Perindustrian Kotamadya Ujung Pandang.

Dari tabel tersebut nampak bahwa nilai bahan baku yang digunakan tahun 1988 sebesar Rp. 51.658.544.000,- meningkat menjadi Rp. 53.562.836.000,- pada tahun 1989 atau berkembang sebesar 3,69 %. Untuk tahun 1990 meningkat menjadi Rp. 55.090.784.000,- atau berkembang sebesar 2,85 %. Kemudian pada tahun 1991 mengalami peningkatan yang cukup besar menjadi Rp. 63.358.673.000,- atau perkembangannya sebesar 15,01 % dari tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 1992 nilai bahan baku adalah sebesar Rp. 67.209.694.000,- atau meningkat sebanyak 6,08 %. Dilihat secara keseluruhan, maka perkembangan nilai bahan baku selama kurun waktu lima tahun tersebut adalah rata-rata berkembang sebesar 6,91 % setiap tahunnya.

Melihat perkembangan industri kecil di Kotamadya Ujung Pandang sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan adanya perkembangan baik dari segi jumlah perusahaan, tenaga kerja yang diserap, investasi, dan nilai produksi maupun nilai bahan baku. Hal inilah tentunya yang diharapkan oleh pemerintah dalam usaha pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, termasuk perluasan kesempatan kerja sehingga dapat menanggulangi masalah ketenagakerjaan.

4.5 Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Pada Subsektor Industri Kecil di Kotamadya Ujung Pandang.

Sejalan dengan kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam membangun negara Indonesia menuju era industrialisasi maka tidak kalah pentingnya bila pemerintah

juga menggalakkan pertumbuhan industri kecil di seluruh wilayah tanah air, termasuk di dalamnya Kotamadya Ujung Pandang.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Kotamadya Ujung Pandang sebagai ibukota Propinsi Sulawesi Selatan telah ditetapkan sebagai pusat pengembangan wilayah untuk kawasan Timur Indonesia.

Sehubungan dengan hal ini maka dirasa perlu untuk mengembangkan industri kecil yang nantinya diharapkan dapat menunjang perkembangan dan pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional, khususnya mengenai pemerataan di dalam pendapatan masyarakat.

Untuk mengetahui tingkat prosentase penyerapan tenaga kerja pada subsektor industri kecil di Kotamadya Ujung Pandang atau tingkat kesempatan kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang bekerja pada industri kecil dengan jumlah angkatan kerja pada suatu waktu tertentu, dengan rumus sebagai berikut:

$$N = \frac{P_b}{P_e} \times 100 \%$$

Dimana:

N = Tingkat Kesempatan Kerja

P_b = Jumlah Tenaga Kerja yang bekerja pada industri kecil pada suatu waktu tertentu.

P_e = Jumlah angkatan kerja pada suatu waktu tertentu.

Berdasarkan rumus tersebut maka dengan menggunakan

data yang nampak pada tabel VIII dan tabel VI dapatlah diketahui besarnya tingkat penyerapan tenaga kerja pada subsektor industri kecil di Kotamadya Ujung Pandang selama tahun 1988 sampai tahun 1992 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tahun 1988 adalah, } N &= \frac{16.511}{249.423} \times 100 \% \\ &= 6,62 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 1989 adalah, } N &= \frac{16.988}{267.622} \times 100 \% \\ &= 6,35 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 1990 adalah, } N &= \frac{17.426}{287.188} \times 100 \% \\ &= 6,10 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 1991 adalah, } N &= \frac{17.477}{308.234} \times 100 \% \\ &= 5,67 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 1992 adalah, } N &= \frac{17.697}{330.820} \times 100 \% \\ &= 5,35 \% \end{aligned}$$

Dengan melihat hasil perhitungan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 1988 tenaga kerja yang dapat diserap industri kecil adalah sebesar 6,6 %

dari keseluruhan angkatan kerja tahun 1988, dan bekerja diberbagai jenis golongan industri kecil. Hal ini berarti 93,4 % bekerja pada berbagai sektor kegiatan seperti pertanian, industri dasar, aneka industri, perdagangan, pegawai dan sampai pada golongan yang menganggur tetapi aktif mencari pekerjaan atau ingin bekerja. Selanjutnya pada tahun 1989 tingkat penyerapan tenaga kerja adalah sebesar 6,35 %. Untuk tahun 1990 sebesar 6,1 %. Kemudian pada tahun 1991 sebesar 5,67 %, dan tahun 1992 sebesar 5,35 %.

Secara keseluruhan prosentase jumlah angkatan kerja yang ditampung oleh industri kecil hanya berkisar 5,4 % sampai 6,6 %. Keadaan ini menggambarkan bahwa daya serap subsektor industri kecil terhadap angkatan kerja masih relatif kecil.

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka secara kondisional hipotesis yang dikemukakan telah terbukti, sekalipun demikian patut pula diakui sumbangannya terhadap pembangunan ekonomi regional Kotamadya Ujung Pandang dan telah pula memberikan peranan yang cukup besar dalam konteks memajukan pembangunan dalam arti luas, paling tidak telah mengupayakan penekanan terhadap pembengkakan sejumlah angkatan kerja tiap tahunnya.

Sehubungan dengan keadaan tersebut, maka selayaknya-lah bila subsektor industri kecil dibina dan dikembangkan secara intensif pada masa-masa mendatang agar peran sertanya lebih dirasakan oleh masyarakat, bukan saja dalam

hal penekanan masalah pengangguran melainkan juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam bidang ini.

4.6 Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pertumbuhan penduduk secara terus menerus menuntut perlunya usaha pemerintah meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan fasilitas lainnya.

Dalam rangka mengatasi masalah perluasan lapangan kerja, ditempuh kebijaksanaan yang menyeluruh dan terpadu. Setiap program dan proyek dalam pembangunan sektoral dan regional, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, diarahkan agar dapat menciptakan lapangan kerja produktif seluas mungkin.

Salah satu usaha untuk menanggulangi masalah kelebihan tenaga kerja, adalah dengan jalan membina dan mengembangkan industri kecil sehingga dapat secara produktif menyerap tenaga kerja.

Dengan melihat keadaan yang dialami oleh subsektor industri kecil yang sehubungan dengan usaha untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produksi dalam negeri, maka dalam rangka pertumbuhan/perkembangan perusahaan industri ini, pembinaan dan pengembangan disegala bidang perlu ditingkatkan.

Kebijaksanaan dan langkah-langkah perlu diambil dalam

usaha untuk mencapai tujuan pembangunan industri, khususnya pembangunan industri kecil. Adapun kebijaksanaan yang dimaksud di sini seperti halnya:

Pemberian pinjaman berupa kredit dengan dasar kelayakan usaha dan bukan lagi atas dasar jaminan, memberikan pendidikan keterampilan dan pembinaan guna meningkatkan mutu dan produktivitas tenaga kerja serta pengembangan keahlian dibidang manajemen dan organisasi. Di samping itu semakin diperluas dan diperbaiki pembangunan prasarana dan sarana serta penyediaan fasilitas-fasilitas lainnya, yang prinsipnya menunjang pertumbuhan industri-industri tersebut.

Karena industri kecil ini merupakan usaha rakyat yang pada umumnya termasuk ekonomi lemah dan banyak melibatkan tenaga kerja yang kurang terampil (unskill labour) dan kurang pendidikan, sehingga bagaimanapun juga perkembangannya agak lambat. Juga diketahui bahwa industri kecil pada umumnya memanfaatkan sumber-sumber alam yang tidak dapat diolah secara ekonomis oleh industri besar dan menengah. Oleh karenanya industri kecil ini termasuk didalamnya usaha kerajinan rakyat merupakan kegiatan masyarakat secara keseluruhan dalam pembangunan nasional dan dalam pelaksanaannya akan sesuai dan sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Sehubungan dengan ini semua, pemerintah telah memberikan banyak bantuan yakni sejak dilaksanakannya Pelita II dan sampai pada Pelita VI ini, berbagai bantuan telah diberikan kepada pengusaha kecil dalam bentuk bimbingan

dan penyuluhan, sarana dan prasarana bbagi penyediaan bahan baku, pemasaran produk dan berbagai macam kredit berupa kredit investasi kecil, kredit modal kerja permanen dan sebagainya.

Salah satu bentuk pembinaan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Departemen Perindustrian adalah berupa bimbingan dan penyuluhan yang pelaksanaannya melalui proyek BIPIK (Bimbingan dan Pengembangan Industri Kecil). Program pembinaan ini dilaksanakan secara berkesinambungan dan terpadu, dan sesuai dengan kebijaksanaan Menteri Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Kerajinan, pelaksanaan pembinaannya dipusatkan pada lokasi tertentu yang disebut dengan "sentra" yaitu suatu kelompok industri kecil yang berada dalam satu wilayah dengan jumlah unit usaha satu atau lebih yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun tugas BIPIK adalah sebagai berikut:

1. Didirikan untuk mengembangkan sentra-sentra industri (produksi), yang akan terpadu antara program industri kecil dan kerajinan dengan pertanian dan di daerah-daerah pedesaan.
2. Mempertinggi mobilitas kerja angkatan kerja dengan mengolah sumber-sumber ekonomi pedesaan.
3. Mengembangkan motivasi bagi penduduk untuk berusaha disektor non agraris dalam rangka transformasi sosial.
4. Memperkenalkan pola kehidupan modern dengan cara meningkatkan teknologi yang dapat dikelola dan dapat


menyediakan lapangan kerja bagi tenaga kerja yang terus mendesak di daerah pedesaan. 19)

Program pembinaan oleh BIPIK ini mencakup berbagai aspek yang dilaksanakan sesuai dengan karakteristik dan fungsi masing-masing kelompok. Untuk itu program ini dibagi dalam 3 (tiga) kelompok pembinaan yaitu sebagai berikut:

1. Pembinaan industri berdasarkan ketrampilan tradisional dititikberatkan pada peningkatan ketrampilan teknis dan manajemen, penggunaan mesin/peralatan yang lebih efisien dan dapat meningkatkan mutu, bantuan pemasaran dan pembinaan organisasi.
2. Pembinaan industri penghasil benda-benda seni, ditekankan pada pengembangan desain, penelitian/mutu bahan, peningkatan ketrampilandalam proses-proses pelengkap yang dapat meningkatkan mutu dan bantuan pemasaran.
3. Pembinaan industri pedesaan diarahkan untuk menunjang program nasional dan pembangunan wilayah sendiri serta pembinaan bidang teknis, ekonomi maupun sosial akan dilaksanakan melalui peningkatan ketrampilan kerja dan penggunaan mesin/peralatanyang efisien serta peningkatan mutu dan pembinaan organisasi serta penyediaan jasa-jasa produksi, pelayanan dan perawatan.

Dengan melihat aspek-aspek tersebut di atas, maka pada dasarnya dapat disimpulkan, bahwa pembinaan tersebut

19) Proyek Bimbingan dan Pengembangan Industri Kecil, (Brosur Dep. Perindustrian Sul-Sel, Tahun 1980, Hal. 3.)



meliputi: Penerapan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, peningkatan ketrampilan yang menyangkut soal-soal organisasi dan manajemen bagi para pengusaha atau pimpinan perusahaan, sedangkan yang menyangkut proses produksi tentunya bagi pekerja diberikan pendidikan dan latihan guna meningkatkan produktivitas kerjanya. Di samping itu juga pembinaan disegi pelayanan dan perawatan sampai pada soal pemasaran hasil-hasil produksi misalnya dalam bentuk koperasi, guna menunjang kehidupan industri yang bersangkutan.

Program tersebut di atas sebagian telah dilaksanakan diberbagai daerah di seluruh Indonesia dengan pemilihan dan jenis komoditi yang sesuai dengan potensi masing-masing wilayah dengan maksud agar sasaran penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pembangunan dapat dicapai.

Khusus industri kecil yang ada di Kotamadya Ujung Pandang selain menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, juga tidak terlepas dari berbagai permasalahan/hambatan yang sifatnya intern maupun ekstern, masalah penting yang dihadapi antara lain menyangkut latar belakang pendidikan para pengrajin pada umumnya sekolah dasar sehingga tingkat kemampuan dan ketrampilan pengusaha/pengrajin dalam pengelolaan usaha berdasarkan prinsip-prinsip administrasi masih rendah, penerapan teknologi pada proses produksi masih semi tradisional, sehingga mempengaruhi kualitas produksi, peranan organisasi dan manajemen sepenuhnya belum dimanfaatkan sehingga mempengaruhi kemampuan

daya saing dan pengembangan daya usaha, kemampuan permodalan yang masih rendah dimana fasilitas kredit bank masih terbentur pada masalah penyediaan agunan, dan sistem pembinaan dari berbagai instansi terkait belum terpadu dan tidak berkelanjutan sehingga pengrajin merasakan manfaatnya. Selain itu perlu pula diketahui bahwa soal pemasaran sering pula mengalami hambatan di beberapa perusahaan. Hal ini disebabkan oleh:

- a. Kurangnya pengetahuan tentang peluang-peluang pasar yang ada.
- b. Persaingan produk-produk yang datang dari luar, dan
- c. Perubahan musiman yang terasa disegi penjualan.

Sehubungan dengan hal ini semua, oleh pemerintah telah diberikan bantuan dari segi permodalan berdasarkan syarat-syarat kredit permodalan yang ringan, namun belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pengusaha industri kecil ini. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dalam proses pengambilan kredit, di samping itu mereka tidak mempunyai jaminan dalam pengambilan kredit dan mereka tidak mau menanggung resiko dalam hal biaya.

4.6.1 Usaha-Usaha Yang Telah Ditempuh Oleh pemerintah Dalam Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil di Kotamadya Ujung Pandang.

Pemerintah dalam hal ini Departemen Perindustrian telah menempuh berbagai usaha dalam pembinaan dan pengembangan industri kecil di Kotamadya Ujung Pandang, dimana

pembinaan industri kecil senantiasa diupayakan untuk menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan, nilai tambah, khususnya industri yang mengolah hasil pertanian, meningkatkan produksi baik jumlah maupun mutunya agar mampu memenuhi permintaan pasar dan produk yang telah memenuhi pasaran ekspor ditingkatkan jumlah dan jenis produksinya. Sentra-sentra industri kecil dan kerajinan pembinaannya ditingkatkan melalui bantuan perangkat lunak dan perangkat keras berupa:

1. Penyuluhan.

Penyuluhan GKM bagi pengrajin/pengusaha industri kecil sebanyak 16 orang.

2. Pelatihan.

Diklat AMT pengusaha meubel/kerajinan rotan dan pandai besi sebanyak 15 orang. Diklat pengemasan industri kecil pangan diikuti sebanyak 15 orang. Diklat bahan tambahan makanan bagi pengusaha makanan/minuman sebanyak 5 orang. Diklat pengolahan sabut kelapa bagi perajin jok kursi sebanyak 2 orang. Diklat ketrampilan rotan bagi perajin rotan sebanyak 27 orang. Diklat kerang-kerangan sebanyak 20 orang.

3. Bimbingan Teknis.

Bimbingan teknis bagi perajin bambu sebanyak 45 orang dan perajin rotan sebanyak 55 orang.

4. Lomba Desain.

Kegiatan lomba desain diikuti perajin perak sebanyak 1 orang.

5. Konvensi GKM.

Konvensi GKM diikuti perajin sebanyak 5 orang.

6. Bantuan Peralatan.

Masing-masing sentra kerajinan perak permai Tello Baru, sentra sepatu Abtra Gaddong, sentra kerang-kerangan Barang Lompo dan Sanggar Mutiara Wajo Baru.

7. Bantuan Bahan.

Masing-masing sentra kerajinan perak permai Tello Baru, Sentra sepatu Abtra Gaddong, sentra kerang-kerangan Barang Lompo dan sanggar mutiara Wajo Baru.

8. Pemasaran.

Berbagai upaya telah dilakukan dan akan diberikan kepada industri kecil dalam usaha meningkatkan hasil produksinya antara lain kegiatan pameran dan promosi, baik lokal, nasional, maupun yang bersifat internasional. Salah satu upaya adalah melalui kerja sama antara bapak angkat dengan mitra usaha industri menengah dan besar maupun dengan sektor ekonomi lainnya.

9. Perizinan.

Kebijaksanaan pemberian izin usaha industri kecil senantiasa berdasarkan SK. Menteri Perindustrian No. 286/M/SK/10/89 Tgl. 10 Oktober 1989 kemudian disempurnakan dengan SK. Menteri Perindustrian No. 16 dan 13 di mana tata cara penyelesaiannya disesuaikan dengan kebijaksanaan Pemda Tingkat II Ujung Pandang. Pemberian usaha industri kecil dengan asset kurang dari Rp. 50 juta diterbitkan oleh Kandep. Sedang asset di

atas Rp. 50 juta Kandep. merekomendasikannya ke Kanwil.

Untuk mengembangkan usaha industri kecil pemerintah telah menerapkan langkah-langkah kebijaksanaan sebagai berikut:

- a. Program keterkaitan dengan tujuan meningkatkan kemampuan usaha industri kecil dalam pemasaran, pengolahan bahan, pengadaan bahan, pengadaan mesin dan peralatan maupun bantuan teknologi dan manajemen usaha.
- b. Menetapkan jenis-jenis industri tertentu dicadangkan untuk industri kecil yang khusus diusahakan oleh masyarakat golongan ekonomi lemah.
- c. Memajukan usaha-usaha tradisional yang telah tumbuh, dikembangkan melalui penganekaragaman jenis produksi dan perluasan daerah pemasaran.
- d. Peningkatan usaha keterkaitan antara cabang/jenis industri dalam penyediaan bahan baku maupun pemasaran hasil produksi. Antara lain:
 - Kopinkra rotan dengan ekspor dalam bentuk pelatihan dan pembuatan komponen-komponen kecil meubel rotan.
 - Kopinkra tegel dan beton dengan pabrik Semen Tonasa dalam hal penyediaan bahan baku semen.
 - Kopinkra Perak dengan CV. Mitra Silver Bali, penyediaan bahan baku, desain serta pemasaran.
- e. Pemanfaatan bahan baku.
 - Potongan kayu dan tripleks untuk bahan baku meubel dan barang kerajinan.
 - Serbuk gergaji untuk bahan batu kapur.

- Kerang-kerangan dan sisik untuk pembuatan kerajinan.
- Potongan besi beton untuk bahan bangunan.
- Buah-buahan untuk industri makanan dan minuman.

Dalam hal pemasaran berbagai upaya telah dilakukan dan akan diberikan kepada pengusaha industri kecil dalam usaha meningkatkan pemasaran hasil produksinya antara lain kegiatan pameran dan promosi yang sifatnya lokal, nasional maupun yang bersifat internasional. Salah satu upaya adalah melalui kerja sama antara bapak angkat dengan mitra usaha industri kecil dengan perusahaan industri menengah dan besar maupun dengan sektor ekonomi lainnya.

BAB V

P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Sebagai rangkuman akhir dari pembahasan yang telah dipaparkan pada bab terdahulu maka pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Jumlah penduduk di Kotamadya Ujung Pandang mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Selama tahun 1988 sampai tahun 1992 pertambahan penduduk sebesar 187.371 jiwa, atau dari 812.957 jiwa pada tahun 1988 meningkat menjadi 1.000.328 jiwa pada tahun 1992. Secara keseluruhan perkembangan jumlah penduduk selama kurun waktu lima tahun tersebut adalah rata-rata bertambah sebesar 46.842 jiwa atau perkembangan relatifnya sebesar 5,40 % setiap tahunnya. Dan sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda yang memerlukan gizi dan fasilitas pendidikan yang lebih baik agar dapat menjadi tenaga kerja yang produktif di masa yang akan datang. Selain itu dengan bertambahnya jumlah penduduk secara terus menerus menyebabkan tenaga kerja dan angkatan kerja juga meningkat yang membutuhkan lapangan kerja baru. Sejak tahun 1988 hingga tahun 1992 jumlah tenaga kerja di Kotamadya Ujung Pandang mengalami kenaikan sebanyak 192.517 orang tenaga kerja. Secara keseluruhan perkembangan jumlah tenaga kerja setiap tahunnya me-

tingkat rata-rata 7,4 %. Sedangkan angkatan kerja sebesar 7,32 %.


2. Perkembangan industri kecil di Kotamadya Ujung Pandang dari tahun ke tahun juga semakin meningkat, baik dari segi jumlah perusahaan, tenaga kerja, investasi dan nilai produksi maupun nilai bahan baku.
Dilihat secara keseluruhan, maka perkembangan jumlah unit usaha selama kurun waktu lima tahun adalah rata-rata bertambah sebesar 2,55 % setiap tahunnya, perkembangan jumlah tenaga kerja setiap tahunnya meningkat rata-rata 1,83 %, nilai investasi adalah sebesar 6,49 %, nilai produksi sebesar 5,68 %, dan perkembangan jumlah nilai bahan baku dilihat secara keseluruhan selama kurun waktu lima tahun tersebut adalah rata-rata berkembang sebesar 6,91 % setiap tahunnya.
3. Dari segi tingkat kesempatan kerja atau jumlah angkatan kerja yang dapat diserap oleh subsektor industri kecil di Kotamadya Ujung Pandang masih relatif kecil, yaitu hanya berkisar 6,6 % yang dapat diserapnya dari keseluruhan angkatan kerja atau tenaga kerja yang tersedia, dibanding dengan jumlah tenaga kerja yang dapat diserap sektor lain diluar sektor industri kecil.
4. Untuk mengembangkan industri kecil dalam kaitannya dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja khususnya di Kotamadya Ujung Pandang, tentunya tidak terlepas kaitannya dengan seluruh potensi yang ada khususnya dari pihak-pihak yang mempunyai wewenang terhadap sektor ini

dan sektor ketenagakerjaan, termasuk partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang berkecimpung dalam sektor industri kecil untuk senantiasa mengupayakan peningkatan dan pengembangan dari sumber daya manusia yang dimanfaatkannya. Sehingga pada gilirannya sektor ini mempunyai kemampuan untuk menjadi tulang punggung perekonomian daerah Kotamadya Ujung Pandang umumnya dan peningkatan pendapatan perkapita dari sebagian besar masyarakat kita, serta dapat menunjang tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor lainnya.

5.2 Saran-Saran.

Sehubungan dengan kesimpulan yang telah penulis uraikan secara sederhana maka penulis ingin memberikan buah pemikiran untuk dijadikan sebagai saran terhadap pengembangan industri kecil dalam upaya untuk menyerap sejumlah angkatan kerja di Kotamadya Ujung Pandang:

1. Agar subsektor industri kecil dapat menampung lebih banyak tenaga kerja, maka hendaknya para pengusaha industri kecil itu agar lebih memperluas usahanya sehingga membuka kesempatan bagi tenaga kerja untuk masuk bekerja, dan kepada tenaga kerja sebelum memasuki pasar kerja maka hendaknya terlebih dahulu membekali diri dengan pendidikan dan meningkatkan ketrampilan baik melalui kursus-kursus ataupun latihan-latihan ketrampilan, serta mereka diharapkan pula memiliki keahlian manajemen.

- 
2. Dalam upaya memperluas kesempatan kerja pada subsektor industri kecil di Kotamadya Ujung Pandang, maka hendaknya pihak Departemen Perindustrian lebih meningkatkan bantuannya kepada para pengusaha dalam mengembangkan usahanya baik berupa pembinaan dan penyuluhan, pemasaran, maupun dalam pengambilan modal kredit. Kepada pihak perbankan dalam penyaluran kredit tidak terlalu tergantung kepada agunan. Tetapi didasarkan kepada kelayakan usaha industri kecil, sehingga pengusaha industri kecil ini dapat lebih mengembangkan usahanya.
 3. Perlu adanya kesinambungan yang terpadu secara lintas sektoral dengan instansi terkait serta pembinaan yang berkelanjutan dalam upaya pengembangan industri kecil dan kerajinan sehingga diharapkan subsektor ini akan dapat tumbuh dan berkembang secara dinamis dalam menopang dan memenuhi tuntutan-tuntutan kehidupan masyarakat yang layak, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang.
 4. Untuk pencapaian tujuan pengembangan industri kecil perlu didukung adanya tenaga penyuluh lapangan yang memiliki kemampuan ketrampilan dan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan teknis kepada pengrajin tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan peningkatan usaha mereka.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-Buku

1. Djojohadikusumo, Sumitro, Indonesia Dalam Perkembangan Dunia Kini dan Masa Depan, Lembaga Penelitian, Pendidikan Dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta, 1984.
2. Kusumosuwidho, Sisdjiatmo, Dasar-Dasar Demografi, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1981.
3. Meyers, L., The Element of Modern Economics, (Prentice Hall, Inc.), New York, 1956.
4. Moch. Sadli, Industrial Economics, (Jakarta Bina Kawan Study Club, Universitas Indonesia, 1971), Hal. 49.
5. Rusli, Said, Pengantar Ilmu Kependudukan, LP3ES, Jakarta, 1988.
6. Saleh, Irsan Azhary, Industri Kecil. Sebuah Tinjauan dan Perbandingan, LP3ES, Jakarta, 1986.
7. Simanjuntak, Payaman J., Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta, 1985.
8. Suhartono, R.B., Pola Dan Struktur Industri Indonesia, Cetakan I, (Rangkuman Seminar Industrialisasi Dalam Rangka Pembangunan Nasional), Jakarta, CSIS, 1982.
9. Simon Kuznets, Modern Economics Growth, Rate Structure and Spread, (Oxford and Publishing Co; 66 Japanth, New Delhi. I, 1965).
10. Sukirno, Sadono, Ekonomi Pembangunan, (Penerbit; Borta Gorat, Medan, 1981).
11. Yudo Swasono dan Endang Sulistyaningsih, Metode Perencanaan Tenaga Kerja, BPFE, Yogyakarta, 1983.

II. Peraturan-Peraturan/Publikasi Lainnya.

1. Departemen Perindustrian Republik Indonesia, Undang-Undang No. 5 tahun 1984 Tentang Perindustrian, Jakarta, 1984, Hal. 62.
2. Ketetapan MPR NO. II/MPR/1988, Tentang GBHN (Bahan Penataran dan Bahan Referensi Penataran), Terbitan